

**RENCANA KERJA SKPD (RENJA)
UNTUK TAHUN 2026**
Berdasarkan Permendagri No.90 Tahun 2019



PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 -2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi. Guna mewujudkan Kesejahteraan masyarakat, baik perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam rangka peningkatan harkat, martabat dan kualitas hidupnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai permasalahan sosial yang timbul, dengan mengedepankan prakarsa dan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada.

Jambi, 27 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA JAMBI**



Dra.Hj. Noverintiwi Dewanti,ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19711125 199201 2 001

DAFTAR ISI

Hal

I. KATA PENGANTAR

II. BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6

III. BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPPA	38
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi (DPMPPA)..	43
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	49
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	64

IV. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	71
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	72
3.3 Program dan Kegiatan.....	76

V. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH	87
---------------------	-----------

V. PENUTUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja OPD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang – Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja OPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD; RPJMD; Renstra SKPD; RKPD; dan RENJA SKPD.

Sesuai amanat tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja DPMPPA Kota Jambi Tahun 2026. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja OPD yang memuat kebijakan program dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dari uraian singkat perencanaan tersebut diatas maka Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi (RENJA DPMPPA) tahun 2026 dibuat atas dasar kewajiban yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan masukan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-RKPD) Kota Jambi.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2026, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pembangunan dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025 – 2029 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025- 2029 yaitu:

“Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa Yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera. “

Visi RPJMD Kota Jambi di jabarkan dalam salah satu misi yaitu **“Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan”** dengan Tujuan :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan
2. Penciptaan ketertiban umum
3. Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Penurunan Ketimpangan Gender

Rencana Kerja DPMPPA Kota Jambi Tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2026 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi disusun berdasarkan landasan hukum :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (K3)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419),
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56).
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PPRG Untuk Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan.
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial dan Adat.

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-4020 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045
28. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 -2029
29. Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.
30. Peraturan Walikota Jambi Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pengarusutamaan Gender.
31. Peraturan Walikota Jambi Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi adalah untuk menentukan indikatif besarnya APBD kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026. Selain itu juga penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan

program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan serta rencana kerjanya.

Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Untuk Menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.
3. Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas hingga pelaksanaan kegiatan bisa optimal.
4. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang dalam rangka fasilitas pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.
5. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi diantara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Sebagai tolak ukur dan alat kendali untuk mengevaluasi / penilaian kinerja DPMPPA Kota Jambi sampai dengan tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak ini dituangkan kedalam 5 (lima) Bab, secara ringkas sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**BAB V.PENUTUP****LAMPIRAN**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan perlindungan Anak tahun 2026 disusun berdasarkan analisa kondisi obyektif permasalahan pembangunan saat itu sekaligus berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Tahun 2024 dalam Renja Perangkat Daerah pagu anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan perlindungan Anak adalah sebesar Rp. 12.089.734.000,-. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 maka dapat dilihat capaian hasil dari alokasi dana yang telah dianggarkan untuk program kegiatan dari masing-masing urusan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi antara lain adalah :

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi untuk Program Kegiatan yang dicapai Tahun 2024 terdiri dari 8 (Delapan) Program dan 17 (enam belas) kegiatan, dimana realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah :

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Tar get %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	61.743.347	100	97,99%	97,99%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	4.348.644.472	100	89,30%	89,30%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	95.500.000	100	91,75%	91,75%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	559.183.492	100	88,53%	88,53%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertibnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1.193.072.261	100	98,70%	98,70%

6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	223.564.800	100	96,74%	96,74%
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	565.393.933	100	94,63%	94,63%
8.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	129.103.811	100	92,76%	92,76%
9.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan	421.501.570	100	97,85%	97,85%
10.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan	219.057.881	100	97,91%	97,91%
11.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Yang Mewujudkan Kesenjangan Gender dan Anak	110.232.806	100	93,30%	93,30%
12.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang anggotanya diberdayakan	44.442.560	100	98,33%	98,33%
13.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	181.552.375	100	95,26%	95,26%
14.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Persentase Cakupan Kota Layak Anak Jumlah Anak Ikut dalam Organisasi Forum Anak Daerah (FAD)	244.300.743	100	99,56%	99,56%
15.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi GN AKSA, PATBM, dan Konvensi Hak anak	80.299.535	100	98,85%	98,85%

16.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh Petugas UPTD PPA	228.599.393	100	96,36%	96,36%
17.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dan Peningkatan Dasawisma	3.213.021.572	100	98,85%	98,85%
Total			12.089.734.000			

Dari capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi pada tahun 2024 dari seluruh kegiatan yaitu 94,51%. Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra DPMPPA pada umumnya sudah tercapai namun masih diperlukan upaya-upaya inovatif untuk meningkatkan dan menjamin kesinambungan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Kebijakan yang harus diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja:

1. Adanya upaya monitoring dan Evaluasi hasil yang lebih efektif
2. Membentuk Tim percepatan capaian program dan kegiatan
3. Membentuk pilot Projek di wilayah RT dan Kelurahan baik kampung bahagia, Ramah Anak, dll

Lebih lengkapnya hasil evaluasi terdapat dalam lampiran TC-29. Dari target sasaran kinerja untuk program kegiatan yang telah ditetapkan pada Urusan Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas dan untuk mencapai target dimaksud maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, mendapatkan Anggaran Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada uraian dibawah ini yaitu :

Capaian kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

					Realisasi
--	--	--	--	--	-----------

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.252.188	100	94,64	94,64
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.491.159	100	99,09	99,09
Total			61.743.347			

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	4.035.703.765	100	89,62	89,62
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	301.965.182	100	84,75	84,75
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.975.525	100	95,91	95,91
Total			4.348.644.472			

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	100	68,48	68,48
2.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70.500.000	100	100	100
Total			95.500.000			

4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**a. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16.094.323	100	87,12	87,12
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dise- diakan	245.527.171	100	95,89	95,89
3.	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang dan Cetakan dan yang Disediakan	26.523.450	100	81,15	81,15
4	Fasilitasi kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.750.000	100	98,26	98,26
5	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	211.700.000	100	92,08	92,08

		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23.588.548	100	90,41	90,41
Total			559.183.492			

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	597.900.000	100	99,80	99,80
2.	Pengadaan Mebel	Paket Mebel yang disediakan	160.103.274	100	96,74	96,74
3.	Pengadaan Peralatan dan mesin	Tersedianya Peralatan Mesin Lainnya yang Disediakan	249.885.792	100	98,07	98,07
Total			1.193.072.261			

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.564.800	100	99,97	99,97
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	202.000.000	100	96,39	96,39
Total			223.564.800			

7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	259.071.700	100	93,23	93,23
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.834.520	100	89,34	89,34
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.824.700	100	97,55	97,55
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	147.663.013	100	98,94	98,94
Total			565.393.933			

8. Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan

a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7

1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	129.103.811	100	92,76	92,76
Total			129.103.811			

b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	421.501.570	100	97,85	97,85
Total			421.501.570			

9. Program Perlindungan Perempuan

a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup	101.499.660	100	100	100

		Daerah Kabupaten/Kota				
Total			101.499.660	100		

b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	91.537.881	100	89,70	89,70
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	127.520.000	100	94,66	94,66
Total			219.057.881	100		

10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	110.232.806	100	93,30	93,30
Total			110.232.806	100		

b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	44.442.560	100	98,33	98,33
Total			44.442.560	100		

11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender

a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	85.575.510	100	95,43	95,43
2.	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	95.976.865	100	95,11	95,11
Total			181.552.375			

12. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	244.300.743	100	99,56	99,56
Total			244.300.743	100		

13. Program Perlindungan Khusus Anak

a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota.

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, dan DRPPA	Terlaksananya Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, dan DRPPA	80.299.535	100	98,85	98,85
Total			80.299.535			

b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %

1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.639.393	100	98,93	98,93
2.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Terlaksananya Layanan AMPK	107.960.000	100	93,49	93,49
Total			228.599.393			

c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.019.789	100	98,75	98,75
Total			69.019.789			

14. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

a) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7

1.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.004.483.517	100	98,12	98,12
2.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	510.119.291	100	97,77	97,77
3.	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.501.905.060	100	99,73	99,73
4.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	77.061.404	100	99,48	99,48
5.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	123.202.300	100	98,21	98,21
Total			3.213.021.572			

Untuk Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2024 dapat dilihat pada Daftar Lampiran I : Tabel T-C.29.

Dari hasil capaian rincian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan Rekapitulasi Capaian program dan kegiatan dari Realisasi Alokasi Anggaran Fisik dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yaitu :

TABEL T-C 29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TAHUN 2025 KOTA JAMBI**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerinta- han Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pro- gram (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun n- 1	Perkiraan Realisasi Capaian Tar- get Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Real- isasi (%)		Realisasi Ca- paian Program dan Kegiatan s/d tahun ber- jalan (tahun n- 1)	Tingkat Ca- paian Real- isasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAE- RAH/ KABUPATEN		2026	2023	2024	2024		2025		
2	08	01			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kabupaten	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B	BB	BB			B	B	
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72		73	73		71,55	71,55	
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Doku- men Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Doku- men	5 Dokumen	100%

2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93	30	33	30	100%	48	48	100%
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	100%	37 Dokumen	37 Dokumen	100%

2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%
											100%			
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
											100%			
2	08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94 Paket	94 Paket	94 Paket	94 Paket		95 Paket	95 Paket	100%
											100%			
2	08	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	3 Orang	4 Orang	4 Orang		7 Orang	7 Orang	100%
											75%			
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
											100%			

						dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU)								
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10 Paket	18 Paket	18 Paket	100%	10 Paket	10 Paket	100%
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	6 Paket	100%
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	8 Paket	6 Paket	100%	8 Paket	8 Paket	100%
2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	100%	25 Laporan	25 Laporan	100%
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	100%	80 Laporan	80 Laporan	100%

2	08	01	2.07		Pengadaan Ba- rang Milik Daerah Penunjang Uru- san Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit					20 Unit	20 Unit	100%
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	11 Unit	23 Unit	23 Unit		32 Unit	32 Unit	100%
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Uru- san Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penun- jang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	250 Laporan	250 Laporan	250 Laporan		250 Laporan	250 Laporan	100%
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sum- ber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	100%

2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (layak pakai)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	100%	21 Unit	21 Unit	100%
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	49 Unit	47 Unit	47 Unit	100%	48 Unit	48 Unit	100%
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	2 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%

						Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									
2	08	02			Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase anggaran responsife gender	10,11							-	0%
						Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Perempuan	64,85								
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Persentase Pemenuhan Standar Pelebagaan PUG Kewenangan Kota	92%							-	0%
2	08	02	2.01	11	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang Mendapatkan Pendampingan	39		39	39	100%	39	25		64%
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota.	Persentase Pemenuhan Standar Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kota	20%							-	0%

2	08	02	2.02	09	Peningkatan Kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, atau sosial dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas karyawan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	200							-	0%
2	08	03			Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%		100%	100%		100%		100%	100%
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Standar Pencegahan KTP	20%							-	0%
2	08	03	2.01	06	Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtP dan TPPO kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi	20 Lembaga							-	0%

						Pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota								
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Per- empuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Mendapatkan Layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	03	2.02	08	Layanan Pen- gaduan atau Pen- jangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Pengaduan atau Pen- jangkauan Korban Ting- kat Kabu- paten/Kota	50 Orang	45 Orang	48 Orang	48 Orang	95,74%	48 Orang	48 Orang	100%
2	08	04			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelaja- ran Keluarga (Puspaga) yang Ber- perspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar	20%						-	0%

2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/kota	Persentase Peningkatan Kelembagaan yang Berkualitas	37,5%						-	0%
2	08	04	02.02	07	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	15 Lembaga						-	0%
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER	Tingkat Pemakaian Data Gender dan Anak dalam Perencanaan dan Evaluasi dan/ atau Penyusunan Kebijakan	12%						-	0%
2	08	05	2.01		Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Persentase Pemenuhan Komponen SIGA	50%						-	0%

					di Tingkat Daerah Kab/Kota.									
2	08	05	2.01	03	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	80%						-	0%
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota.	Persentase Pelembagaan PHA	81%						-	0%

2	08	06	2.01	03	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/ kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	101 Organisasi							101 Organisasi	100%
2	08	07			Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%							100%	100%
						Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	75							-	0%

2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota.	Persentase pemenuhan Standar pencegahan KTA	20%							-	0%
2	08	07	2.01	07	Advokasi dan Sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat kab/kota	5 Kegiatan							-	0%
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordianasi Tingkat Daerah Kab/Kota.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Tangani	100%	100%	100%	96%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	07	2.02	13	Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban tingkat Kabupaten/kota	50 Anak	50 Anak	48 Anak	48 Anak	94%	49 Anak	49 Anak	100%	100%

2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	87%						-	0%
2	13	05	2.01	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota.	Persentase pemenuhan kriteria Lemabga kemasyarakatan dan lembaga adat yang berkualitas	87%						-	0%
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Lembaga	6 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	5 Lembaga	5 Lembaga	100%

						yang Ditingkatkan Kapasitasnya								
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPMPPA

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, juga melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan Masyarakat, memfasilitasi kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan organisasi perempuan, dan perlindungan anak serta meningkatkan kesetaraan gender.

Sekarang perempuan telah berperan bukan saja di sektor pendidikan tetapi telah masuk di sektor politik, ekonomi, hukum dan lainnya. Meskipun perempuan memiliki keunggulan, namun eksistensi perempuan menghadapi tantangan terutama tantangan dari dalam diri sendiri, perempuan merasa tidak berani dan tidak memanfaatkan potensinya karena merasa harus berperan di sektor domestik dengan berbagai alasan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dimana saja baik ditempat umum, di sekolah maupun dilingkungan keluarga, selain itu pelaku kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja yaitu oleh orang tua, saudara laki-laki ataupun perempuan serta orang lain tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, pekerjaan atau lama perkawinan. Karena itu masalah kekerasan

terhadap perempuan dan anak tidak saja merupakan masalah keluarga, tapi juga merupakan masalah nasional bahkan global.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya melakukan pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak serta melakukan penanganan korban kekerasan. Dilihat dari visi dan misi Walikota terpilih untuk RPJMD 2025-2030 **"Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa Yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera."**

Rumusan cita-cita yang ingin diwujudkan dari visi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

BERSIH, mengandung makna mempertahankan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumberdaya dan pemanfaatan energi terbarukan dengan terus memperkuat sistem perkotaan yang merata dan terintegrasi;

AMAN, mengandung makna menciptakan suasana kota yang tertib, aman, dan nyaman dalam mendukung kehidupan masyarakat

HARMONIS, mengandung makna menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna memperhitungkan kepentingan jangka Panjang dan kesejahteraan generasi mendatang;

AGAMIS, mengandung makna meningkatkan kualitas akhlak masyarakat dan memperkuat budaya serta kearifan lokal sebagai identitas, daya tarik, dan potensi wisata;

INOVATIF, mengandung makna memperkuat kreatifitas, inovasi, pemanfaatan teknologi, dan informasi dalam meningkatkan pelayanan serta perwujudan kota pintar melalui pemerintahan yang baik; dan

SEJAHTERA, mengandung makna mewujudkan SDM yang berdaya saing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai melalui agenda pembangunan yang akan dilaksanakan. Misi pembangunan jangka menengah dalam upaya mewujudkan pencapaian visi

Dengan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pembangunan Kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman. Bertakwa, berilmu dan menghargai nilai-nilai luhur budaya local.
- b. Mewujudkan Kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar kabupaten maupun provinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.
- c. Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemerintahan, fasilitas umum dan pusat kegiatan ekonomi.
- d. Mengembangkan Pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas

Pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sector riil.

- e. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi
- f. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan Serta Penataan Lingkungan
- g. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan
- h. Peningkatan Kualitas Masyarakat Perkotaan

Adapun Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dengan Indikator KINERJA Utama adalah sebagai Berikut :

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
2. Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (APE)
3. Predikat Kota Layak Anak (KLA)
4. Persentase keselarasan pelaksanaan Kampung Bahagia

Dari hasil pembahasan diatas berdasarkan visi dan misi pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi akan memberikan pelayanan yang maksimal dan melaksanakan tugas dan fungsi kewenangannya sesuai RPJMD Pemerintah Kota Jambi Tahun 2025 -20230. pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dapat di Lihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPPA Kota Jambi

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>		<i>7</i>		<i>8</i>		<i>9</i>
1	Indeks Ketimpangan Gender		-	-	-	0,350	0,347	0,358	Belum Rilis	0,34	0,32	
2	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		-	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Madya	Belum Rilis	Nindya	Nindya	
3	Predikat Kota Layak Anak			Nindya	Nindya	Utama	Utama	Madya	Utama	Utama	Utama	
4	Persentase keselarasan pelaksanaan Kampung Bahagia		-	-	-	87%	87,5%	-	-	87%	87,5%	

Tabel 2.2 menunjukkan pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Indeks Ketimpangan Gender juga merupakan indikator baru digunakan pada tahun 2026 dengan target 0,34 sehingga tidak adanya data realisasi untuk tahun 2024 dan 2025. Indikator Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE) memiliki target pada tahun 2026 dengan predikat Nindya pada tahun 2026 adalah Untuk Indikator Predikat Kota Layak Anak, memiliki target Nindya pada tahun 2025 dengan hasil realisasi yang lebih tinggi yaitu dengan Predikat Utama sehingga target untuk tahun selanjutnya menjadi Utama. Selanjutnya untuk indikator Pelaksanaan Keselarasan Kmapung Bahagia di tahun 2026 menetapkan Target 78%

Tabel 2.2 menunjukkan pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki target 87% untuk tahun 2026, realiasi indikator ini untuk tahun 2024 dan 2025 tidak tersedia dikarenakan indikator ini merupakan indikator yang baru di masukkan dalam Rentra DPMPPA Tahun 2025-2029. Untuk indikator Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE), telah mendapatkan nilai Madya pada tahun 2024 dan untuk tahun 2025 memiliki target Nindya. Namun, untuk hasil penilaian tahun 2025 belum di rilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk Indikator Indeks Ketimpangan Gender juga merupakan indikator baru digunakan pada tahun 2026 dengan target 0,34 sehingga tidak adanya data realisasi untuk tahun 2024 dan 2025. Untuk Indikator persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani memiliki target 100% di setiap tahunnya dan juga direalisasikan sebesar 100%. Untuk Indikator Predikat Kota Layak Anak, memiliki target Nindya pada tahun 2025 dengan hasil nilai realisasi yang lebih tinggi yaitu Utama sehingga target untuk tahun selanjutnya menjadi Utama.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, juga melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan Masyarakat, memfasilitasi kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan organisasi perempuan, dan perlindungan anak serta meningkatnya kesetaraan gender. Sekarang perempuan telah berperan bukan saja di sektor pendidikan tetapi telah masuk di sektor politik, ekonomi, hukum dan lainnya. Meskipun perempuan memiliki keunggulan, namun eksistensi perempuan menghadapi tantangan terutama tantangan dari dalam diri sendiri, perempuan merasa tidak berani dan tidak memanfaatkan potensinya karena merasa harus berperan di sektor domestik dengan berbagai alasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dimana saja baik ditempat umum, di sekolah maupun dilingkungan keluarga, selain itu pelaku kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja yaitu oleh orang tua, saudara laki-laki ataupun perempuan serta orang lain tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, pekerjaan atau lama perkawinan. Karena itu masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak saja merupakan masalah keluarga, tapi juga merupakan masalah nasional bahkan global. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya melakukan pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak serta melakukan penanganan korban kekerasan.

Koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilakukan melalui penyelarasan penyusunan dokumen Renstra antara Renstra Kementerian dengan Renstra Perangkat Daerah di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyelarasan tersebut diharapkan akan mampu memberikan hasil yang optimal antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencapaian kinerja pembangunan nasional. Pengintegrasian 5 (lima) arahan Presiden Republik Indonesia antara lain Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan, peningkatan Peran Ibu dalam Pendidikan Anak, Penurunan

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Pencegahan Perkawinan Anak telah dimasukkan dalam program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Pusat dan Visi dan misi Kepala Daerah.

Penyusunan dokumen Renja DPMPPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan tujuan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan tingkat Nasional, dokumen Renja DPMPPA ini juga memperhatikan kebijakan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Selanjutnya, sebagai bagian dalam upaya bersama mengusung isu dunia internasional tentang tema yang serupa, Renja ini juga memperhatikan arahan dalam SDGs (Sustainable Development Goals) yang sangat kental dengan isu perempuan dan anak. Tidak hanya berhenti sampai disini, selain memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain yang bersifat langsung, dalam penyusunan dokumen Renja DPMPPA ini juga memperhatikan dokumen perencanaan lain, sehingga diharapkan dapat terjadi sinergisitas perencanaan Pembangunan. Selanjutnya juga melalui program-program yang telah di rencanakan diharapkan berdampak langsung pada tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) diantaranya adalah :

- **Pengurangan kemiskinan (SDG 1):** Pemberdayaan perempuan dan anak melalui pendidikan dan ekonomi yang lebih baik dapat membantu memutus rantai kemiskinan.
- **Pendidikan berkualitas (SDG 4):** Program pemberdayaan perempuan dan anak secara langsung mendukung tujuan untuk memastikan pendidikan yang berkualitas dan setara, salah satunya dengan memastikan anak perempuan mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan anak laki-laki.
- **Kesehatan dan kesejahteraan (SDG 3):** Peningkatan kesetaraan gender melalui akses kesehatan yang lebih baik bagi perempuan dan anak perempuan berkontribusi pada pencapaian kesehatan dan kesejahteraan.
- **Pemerintahan yang baik:** Keterlibatan perempuan dalam urusan publik dan pengambilan keputusan di tingkat lokal (seperti di desa) menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan pencapaian SDGs secara keseluruhan, termasuk tata kelola yang baik.

- **Pembangunan berkelanjutan:** Jika program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak dimasukkan dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan, maka target-target SDGs tidak akan tercapai.

a. Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Jambi

Berdasarkan Peluang dan potensi yang dimiliki, DPMPPA Kota Jambi juga menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak selama 5 (lima) tahun kedepan pada periode 2025 – 2029, baik pada aspek penataan dan penguatan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

1. Kurangnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah terhadap Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi perempuan di lembaga legislatif sehingga menyebabkan keterwakilan perempuan masih rendah.
3. Kurangnya daya saing perempuan pada jabatan-jabatan yang bersifat profesional, administrasi, teknis pada lembaga swasta atau pemerintah.
4. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga.
5. Masih ditemukannya peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak.
6. Belum optimalnya koordinasi Pokja Pengarusutamaan Gender dan Focal poin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda, dampaknya terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan.

- Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:

1. Masih tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan

2. Masih terdapat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap perempuan.
 3. Masih rendahnya kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada lembaga layanan (Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).
 4. Belum Adanya Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di wilayah kecamatan.
- Permasalahan terkait perlindungan anak:
 1. Masih tingginya jumlah korban kekerasan terhadap anak
 2. Belum maksimalnya pendampingan, pelayanan dan perlindungan terhadap kekerasan anak.
 - Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
 1. Masih kurangnya ruang bermain ramah anak yang sesuai standar.
 2. Belum optimalnya partisipasi gugus tugas KLA dalam membangun kota layak anak.
 - Permasalahan terkait Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan:
 1. Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya.
 2. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan karena keterbatasnya akses masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam lokal.
 3. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemasyarakatan dan mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas.
 4. Lembaga kelurahan sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat untuk partisipasi dalam pembangunan belum berfungsi optimal.

5. Belum optimalnya Masyarakat peduli terhadap Adat dan Budaya yang harus dilestarikan.
6. Masih tingginya jumlah masyarakat kurang mampu.

b. Isu Strategis DPMPPA Kota Jambi

Berdasar peluang dan potensi yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi juga menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak selama 5 (lima) tahun kedepan pada periode 2025–2029, pada aspek penataan dan penguatan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Isu Strategis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain sebagai berikut :
 - a. tingginya kasus kekerasan, rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dan hak anak, serta belum optimalnya ketahanan keluarga. Isu-isu ini diatasi melalui peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
 - b. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan yang memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda. Dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan.
 - b. Rendahnya partisipasi masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal dan masih seringkali masyarakat tidak diposisikan sebagai subjek pembangunan.
 - c. Perdagangan orang (trafficking) Masih banyaknya pintu masuk perdagangan orang, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi, yang menyulitkan pengendalian
 - d. Peningkatan kualitas hidup perempuan: Isu ini mencakup peningkatan

partisipasi perempuan dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidupnya.

- e. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan sumber daya manusia yang bertugas dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak perlu ditingkatkan.
- a. Belum optimalnya penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, KDRT dan kasus trafficking, serta Penanganan kasus-kasus permasalahan anak.

2. Isu Strategis Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi dan komitmen;

- a) Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya.
- b) Rendahnya komitmen pemangku kepentingan (pemerintah pusat dan daerah) dalam pengembangan usaha dan pembangunan partisipatif.
- c) Kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam proses pembangunan.

Keterbatasan sumber daya;

- a) Terbatasnya alokasi anggaran daerah untuk program pemberdayaan.
- b) Kurangnya sarana prasarana dan kualitas aparatur.
- c) Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah daerah (SKPD

Pembangunan ekonomi;

- a) Masih rendahnya akses UMKM terhadap modal, bahan baku, teknologi, dan pasar.
- b) Belum tumbuhnya wirausaha baru dan daya saing UMKM.
- c) Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Isu sosial dan gender;

- a) Ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan gender.
- b) Masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c) Belum optimalnya pemenuhan hak anak.
- d) Peran perempuan dalam pembangunan belum optimal.
- e) Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai filosofi adat.

Kapasitas kelembagaan;

- a) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat.
- b) Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mengefektifkan pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.

Teknologi;

- a) Keterbatasan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang akuntabel yang pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual diperlukan tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggung jawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Review rancangan awal renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2026 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sebagaimana tersebut pada tabel reuiu terhadap rancangan awal renja SKPD Tahun 2026, sebagaimana tabel T-C. 31 terlampir.

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Ca- paian	Pagu Indikator (Rp. .)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. .)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program 1										
	Penunjang Uru- san Pemerinta- han Daerah/Ka- bupaten	DPMPP A	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Dae- rah	BB	8.109.310.961	Penunjang Uru- san Pemerinta- han Daerah/Ka- bupaten	DPMP PA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Dae- rah	BB	8.510.959.098	
	Kegiatan 1.1		Indikator Kegiatan 1.1			Kegiatan 1.1		Indikator Kegiatan 1.1			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dae- rah	DPMPP A	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,55	25.684.220	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dae- rah	DPMP PA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,55	26.583.168	
	Sub Kegiatan 1.1.1		Indikator Sub Kegiatan 1.1.1			Sub Kegiatan 1.1.1		Indikator Sub Kegiatan 1.1.1			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dae- rah	DPMPP A	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	12.548.661	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dae- rah	DPMP PA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Doku- men	12.987.864	

	Sub Kegiatan 1.1.2		Indikator Sub Kegiatan 1.1.2			Sub Kegiatan 1.1.2		Indikator Sub Kegiatan 1.1.2			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMP A	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	13.135.559	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMP PA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	13.595.304	
	Kegiatan 2.1		Indikator Kegiatan 2.1			Kegiatan 2.1		Indikator Kegiatan 2.1			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMP A	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	95%	6.118.811.951	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMP PA	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	95%	6.450.792.621	
	Sub Kegiatan 2.1.1		Indikator Sub Kegiatan 2.1.1			Sub Kegiatan 2.1.1		Indikator Sub Kegiatan 2.1.1			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/ Bulan	5.798.086.171	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/ Bulan	6.118.840.404	
	Sub Kegiatan 2.1.2		Indikator Sub Kegiatan 2.1.2			Sub Kegiatan 2.1.2		Indikator Sub Kegiatan 2.1.2			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	DPMP A	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37 Dokumen	313.580.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	DPMP PA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37 Dokumen	331.952.217	
	Sub Kegiatan 2.1.3		Indikator Sub Kegiatan 2.1.3			Sub Kegiatan 2.1.3		Indikator Sub Kegiatan 2.1.3			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	DPMP A	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan	-	7.146.180	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	DPMP PA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	-	-	

	angan Bu- lanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Bulanan/Triwulanan/ Se- mesteran SKPD			angan Bu- lanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Penyusunan Laporan Keuangan Bu- lanan/Triwulanan/Se- mesteran SKPD			
	Kegiatan 3.2		Indikator Kegiatan 3.2			Kegiatan 3.2		Indikator Kegiatan 3.2			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPP A	IP ASN Perangkat Dae- rah	100%	120.150.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMP PA	IP ASN Perangkat Dae- rah	100%	134.355.250	
	Sub Kegiatan 3.2.1		Indikator Sub Kegiatan 3.2.1			Sub Kegiatan 3.2.1		Indikator Sub Kegiatan 3.2.1			
	Pengadaan Pa- kaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPP A	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94 Paket	70.150.000	Pengadaan Pa- kaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMP PA	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94 Paket	124.355.250	
	Sub Kegiatan 3.2.2		Indikator Sub Kegiatan 3.2.2			Sub Kegiatan 3.2.2		Indikator Sub Kegiatan 3.2.2			
	Bimbingan Teknis Imple- mintasi Pera- turan Perun- dang-undangan	DPMPP A	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	2 Orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Imple- mintasi Pera- turan Perun- dang-undangan	DPMP PA	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	2 Orang	10.000.000	
	Kegiatan 4.1		Indikator Kegiatan 4.1			Kegiatan 4.1		Indikator Kegiatan 4.1			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPP A	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBUS	100%	437.329.151	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMP PA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBUS	100%	452.635.672	
	Sub Kegiatan 4.1.1		Indikator Sub Kegiatan 4.1.1			Sub Kegiatan 4.1.1		Indikator Sub Kegiatan 4.1.1			

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor	DPMP A	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16.086.533	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor	DPMP PA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16.649.562	
	Sub Kegiatan 4.1.2		Indikator Sub Kegiatan 4.1.2			Sub Kegiatan 4.1.2		Indikator Sub Kegiatan 4.1.2			
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	DPMP A	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	256.321.973	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	DPMP PA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	265.293.242	
	Sub Kegiatan 4.1.3		Indikator Sub Kegiatan 4.1.3			Sub Kegiatan 4.1.3		Indikator Sub Kegiatan 4.1.3			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMP A	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	19.890.645	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMP PA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20.586.818	
	Sub Kegiatan 4.1.4		Indikator Sub Kegiatan 4.1.4			Sub Kegiatan 4.1.4		Indikator Sub Kegiatan 4.1.4			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMP A	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18 Laporan	32.080.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMP PA	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18 Laporan	34.030.800	
	Sub Kegiatan 4.1.5		Indikator Sub Kegiatan 4.1.5			Sub Kegiatan 4.1.5		Indikator Sub Kegiatan 4.1.5			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMP A	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	112.150.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMP PA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	116.075.250	
	Sub Kegiatan 4.1.6	DPMP A	Indikator Sub Kegiatan 4.1.6			Sub Kegiatan 4.1.6		Indikator Sub Kegiatan 4.1.6			
	Kegiatan 5.1		Indikator Kegiatan 5.1			Kegiatan 5.1		Indikator Kegiatan 5.1			

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMP A	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100%	572.406.339	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMP PA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100%	582.440.561	
	Sub Kegiatan 5.1.1		Indikator Sub Kegiatan 5.1.1			Sub Kegiatan 5.1.1		Indikator Sub Kegiatan 5.1.1			
	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	DPMP A	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	341.171.790	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	DPMP PA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	343.112.803	
	Pengadaaan Mebel	DPMP A	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 unit	231.234.549	Pengadaaan Mebel	DPMP PA	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 unit	239.327.758	
	Kegiatan 6.1		Indikator Kegiatan 6.1			Kegiatan 6.1		Indikator Kegiatan 6.1			
	Penyediaan Jasa Penun- jang Urusan Pemerintah Daerah	DPMP A	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	215.844.800	Penyediaan Jasa Penun- jang Urusan Pemerintah Daerah	DPMP PA	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	223.399.368	
	Sub Kegiatan 6.1.1		Indikator Sub Kegiatan 6.1.1			Sub Kegiatan 6.1.1		Indikator Sub Kegiatan 6.1.1			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	DPMP A	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	202.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	DPMP PA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	223.399.368	
	Kegiatan 7.1		Indikator Kegiatan 7.1			Kegiatan 7.1		Indikator Kegiatan 7.1			

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPP A	Persentase Peningkatan BMD Dalam Kondisi Baik (Layak Pakai)	100%	619.084.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMP PA	Persentase Peningkatan BMD Dalam Kondisi Baik (Layak Pakai)	100%	640.752.458	
	Sub Kegiatan 7.1.1		Indikator Sub Kegiatan 7.1.1			Sub Kegiatan 7.1.1		Indikator Sub Kegiatan 7.1.1			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPP A	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	254.733.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMP PA	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	263.649.483	
	Sub Kegiatan 7.1.2		Indikator Sub Kegiatan 7.1.2			Sub Kegiatan 7.1.2		Indikator Sub Kegiatan 7.1.2			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	DPMPP A	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	116.409.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	DPMP PA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	120.483.315	
	Sub Kegiatan 7.1.3		Indikator Sub Kegiatan 7.1.3			Sub Kegiatan 7.1.3		Indikator Sub Kegiatan 7.1.3			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPP A	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	96.630.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMP PA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	100.012.257	
	Sub Kegiatan 7.1.4		Indikator Sub Kegiatan 7.1.4			Sub Kegiatan 7.1.4		Indikator Sub Kegiatan 7.1.4			

	Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	DPMPP A	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	151.311.500	Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	DPMP PA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	156.607.403	
1	Program 1		Indikator Program 1			Program 1					
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	DPMPP A	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	87%	2.395.141.589	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	DPMP PA	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	87%	4.042.967.556	
	Kegiatan 1.1		Indikator Kegiatan 1.1			Kegiatan 1.1					
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota	DPMPP A	Persentase pemenuhan kriteria Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang berkualitas	87%	2.395.141.589	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota	DPMP PA	Persentase pemenuhan kriteria Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang berkualitas	87%	4.042.967.556	
	Sub Kegiatan 1.1.1		Indikator Sub Kegiatan 1.1.1			Sub Kegiatan 1.1.1					

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan, (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	DPMPP A	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	1.457.806.667	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan, (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	DPMP PA	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	3.442.967.556	
	Sub Kegiatan 1.1.2		Indikator Sub Kegiatan 1.1.3			Sub Kegiatan 1.1.2					
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DPMPP A	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Dokumen	1.062.012.259	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DPMP PA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Dokumen	600.000.000	
2	Program 2		Indikator Program 2			Program 2					
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DPMPP A	Tingkat Pemanfaatan data Gender dan Anak dalam perencanaan dan evaluasi dan / atau penyusunan kebijakan	12%	141.848.064	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DPMP PA	Tingkat Pemanfaatan data Gender dan Anak dalam perencanaan dan evaluasi dan / atau penyusunan kebijakan	12%	146.730.392	
	Kegiatan 2.1		Indikator Kegiatan 2.1			Kegiatan 2.1					
	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota.	DPMPP A	Persentase pemenuhan komponen SIGA	50%	141.848.064	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota.	DPMP PA	Persentase pemenuhan komponen SIGA	50%	146.730.392	

	Sub Kegiatan 2.1.1		Indikator Sub Kegiatan 2.1.1			Sub Kegiatan 2.1.1					
	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	DPMPA	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	141.848.064	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	DPMPA	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	146.730.392	
3	Program 3	DPMPA	Indikator Program 3			Program 3					
	Program Pemenuhan Hak Anak		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	80	187.043.418	Program Pemenuhan Hak Anak	DPMPA	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	80	193.507.593	
	Kegiatan 3.1		Indikator Kegiatan 3.1			Kegiatan 3.1					
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota.	DPMPA	Persentase pelembagaan PHA	81%	187.043.418	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota.	DPMPA	Persentase pelembagaan PHA	81%	193.507.593	
	Sub Kegiatan 3.1.1		Indikator Sub Kegiatan 3.1.1			Sub Kegiatan 3.1.1					
	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	DPMPA	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	101 Organisasi	187.043.418	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	DPMPA	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	101 Organisasi	193.507.593	

	Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota					
4	Program 4		Indikator Program 4			Program 4					
	Perlindungan Khusus Anak	DPMP-PPA	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	443.878.613	Perlindungan Khusus Anak	DPMP PA	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	459.332.020	
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	75				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	75		
	Kegiatan 4.1		Indikator Kegiatan 4.1			Kegiatan 4.1					
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota.	DPMPPA	Persentase pemenuhan standar pencegahan KTA	100%	186.269.715	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota.	DPMP PA	Persentase pemenuhan standar pencegahan KTA	100%	284.200.811	
	Sub Kegiatan 4.1.2		Indikator Sub Kegiatan 4.1.2			Sub Kegiatan 4.1.2					
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP-PPA	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA tingkat kabupaten/kota	5 Kegiatan	65.002.300	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP PA	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA tingkat kabupaten/kota	5 Kegiatan	284.200.811	
	Kegiatan 4.2		Indikator Kegiatan 4.2			Kegiatan 4.2					

	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota.	DPMPP A	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Tangani	100%	169.208.898	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota.	DPMP PA	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Tangani	100%	175.131.209	
	Sub Kegiatan 4.2.1		Indikator Sub Kegiatan 4.2.1			Sub Kegiatan 4.2.1		Indikator Sub Kegiatan 4.2.1			
	Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	DPMPP A	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban tingkat kabupaten/kota	50 Orang	58.178.598	Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	DPMP PA	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban tingkat kabupaten/kota	50 Orang	175.131.209	
	Program 5		Indikator Program 5			Program 5					
	Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPP A	Persentase Anggaran Responsif Gender	10,11%	433.556.231	Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPMP PA	Persentase Anggaran Responsif Gender	10,11%	448.648.355	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	64,85%				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	64,85%		
	Kegiatan 5.1		Indikator Kegiatan 5.1			Kegiatan 5.1					
	Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	DPMPP A	Persentase pemenuhan Standar Pelembagaan PUG Kewenangan Kota	92%	130.180.244	Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	DPMP PA	Persentase pemenuhan Standar Pelembagaan PUG Kewenangan Kota	92%	134.633.509	
	Sub Kegiatan 5.1.1	DPMPP A	Indikator Sub Kegiatan 5.1.1			Sub Kegiatan 5.1.1					

	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan	39 Lembaga	130.180.244	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP PA	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan	39 Lembaga	134.633.509	
	Kegiatan 5.2		Indikator Kegiatan 5.2			Kegiatan 5.2		Indikator Kegiatan 5.2			
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan KAB/Kota.	DPMP PA	Persentase pemenuhan Standar Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota	20%	303.395.987	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan KAB/Kota.	DPMP PA	Persentase pemenuhan Standar Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota	20%	314.014.846	
	Sub Kegiatan 5.2.1		Indikator Sub Kegiatan 5.2.1			Sub Kegiatan 5.2.1		Indikator Sub Kegiatan 5.2.1			
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, atau Hukum, atau Sosial, dan atau Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP PA	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	200 Orang	303.395.987	Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, atau Hukum, atau Sosial, dan atau Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP PA	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	200 Orang	314.014.846	
6	Program 6		Indikator Program 6			Program 6					
	Peningkatan Kualitas Keluarga		Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berspektif Gender dan hak anak sesuai standar	25	94.506.589	Peningkatan Kualitas Keluarga		Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berspektif Gender dan hak anak sesuai standar	25	97.731.976	
	Kegiatan 6.1		Indikator Kegiatan 6.1			Kegiatan 6.1					

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah kerjanya dalam Daerah Kab/kota	DPMPP A	Persentase peningkatan kelembagaan yang berkualitas	37,5%	32.931.125	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah kerjanya dalam Daerah Kab/kota	DPMP PA	Persentase peningkatan kelembagaan yang berkualitas	37,5%	97.731.976	
	Sub Kegiatan 6.2.1		Indikator Sub Kegiatan 6.2.1			Sub Kegiatan 6.2.1		Indikator Sub Kegiatan 6.2.1			
	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPP A	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	15	32.931.125	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP PA	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	15	97.731.976	
7	Program 7		Indikator Program 7			Program 7		Indikator Program 7			
	Perlindungan Perempuan	DPMP PA	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	308.594.545	Perlindungan Perempuan	DPMP PA	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	319.313.010	
	Kegiatan 7.1		Indikator Kegiatan 7.1			Kegiatan 7.1		Indikator Kegiatan 7.1			
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DPMPP A	Persentase pemenuhan standar pencegahan KTP	20%	64.997.700	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DPMP PA	Persentase pemenuhan standar pencegahan KTP	20%	67.272.620	

	Sub Kegiatan 7.2.1		Indikator Sub Kegiatan 7.2.1			Sub Kegiatan 7.2.1					
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPP A	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	20 Lem-baga	64.997.700	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP PA	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	20 Lem-baga	67.272.620	
	Kegiatan 7.2		Indikator Kegiatan 7.2			Kegiatan 7.2		Indikator Kegiatan 7.2			
	Penyediaan layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPP A	Persentase Korban Kekerasan Perempuan Yang Mendapatkan Layanan	100%	243.596.845	Penyediaan layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP PA	Persentase Korban Kekerasan Perempuan Yang Mendapatkan Layanan	100%	252.040.390	
	Sub Kegiatan 7.2.1		Indikator Sub Kegiatan 7.2.1			Sub Kegiatan 7.2.1		Indikator Sub Kegiatan 7.2.1			
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	DPMPP A	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	50 Orang	67.337.145	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	DPMP PA	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	50 Orang	252.040.390	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jambi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Hasil Evaluasi Inspektorat
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jambi	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72	Hasil Evaluasi Inspektorat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jambi	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	95%	Tepat Waktu = Paling Lambat Tanggal 15 Bulan Berikutnya dihitung 100 % Tidak Tepat Waktu = Di bawah Tanggal 15 Bulan Berikutnya dihitung 0 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jambi	Indeks Profesionalitas ASN PD	100%	Hasil perhitungan BKPSDMD Kota Jambi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jambi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU	100%	(Jumlah sarana dan prasarana kerja s/dTahun N dibagi Jumlah sarana dan prasarana kerja sesuai ketentuan) X 100%

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jambi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	(Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Tahun N dibagi Jumlah rencana pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Tahun N) X 100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	Persentase Peningkatan BMD Dalam Kondisi Baik (Layak Pakai)	100%	(Jumlah pemeliharaan BMD Tahun N dibagi RKBMD Pemeliharaan Tahun N) X 100%
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jambi	Persentase Anggaran Responsif Gender	10.11%	Rumus : Jumlah ARG pada belanja operasional dan Modal APBD dibagi (:) Jumlah seluruh belanja operasional dan modal di APBD x 100%
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	64,85%	TPAK= jumlah angkatan kerja / jumlah penduduk 15 th keatas x 100%
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase pemenuhan Standar Pelembagaan PUG Kewenangan Kota	92%	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase pemenuhan Standar Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kota	20%	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jambi	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	Jumlah Kekerasan Perempuan dan

					TPPO : Jumlah Kekerasan Yang dilayani x 100%
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase Korban Kekerasan Perempuan Yang Mendapatkan Layanan	100%	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jambi	Persentase pemenuhan standar pencegahan KTP	20%	
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jambi	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berspektif Gender dan hak anak sesuai standar	25	Indikator-indikator ini diukur melalui beberapa dimensi seperti kualitas legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologi, dan sosial budaya dalam mendukung kesetaraan gender dan hak anak
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase Peningkatan Kelembagaan yang Berkualitas	37,5%	
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jambi	Tingkat Pemanfaatan data Gender dan Anak dalam perencanaan dan evaluasi/ atau penyusunan kebijakan	12%	(Jumlah Program yang Menggunakan Data Terpilah) : Total Jumlah Program x 100%
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase pemenuhan komponen SIGA	50%	

6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Jambi	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	80	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) . IPHA dihitung dengan mengukur capaian pemenuhan hak anak yang mencakup lima klaster, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan khusus. Perhitungan IPHA biasanya dilakukan oleh pemerintah dan diukur melalui berbagai indikator di setiap klaster tersebut
---	-----------------------------------	-------	----------------------------------	----	--

	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase pelembagaan PHA	81%	
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jambi	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan : Jumlah Semua Anak Memerlukan Perlindungan Khususx 100%
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	75	Menggunakan sejumlah indikator yang terdiri dari 4 klaster, yang mencakup 22 indikator, seperti data akta kelahiran anak dan data anak yang menjadi korban kekerasan.
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase pemenuhan standar pencegahan KTA	100%	(Jumlah anak korban kekerasan / Jumlah total anak dalam populasi) * 10.000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Tangani	100%	
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM	Jambi	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	87%	

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunyah Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah	Jambi	Persentase pemenuhan kriteria Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang berkualitas	87%	
--	---	-------	--	-----	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi merupakan salah satu organisasi perangkat pemerintah kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Jambi, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak bentuk kegiatan yang sangat diperlukan adalah yang bersifat pelayanan, fasilitasi, regulasi dan motivasi. Kesemuanya itu diarahkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Jambi

NO	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman Umum, Perlindungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)		Predikat Kota Layak Anak (KLA)
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Persentase Pelaksanaan Kampung Bahagia
					Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan di formulasikannya tujuan strategik ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategik ini juga akan memungkinkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategik dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Penetapan tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi dan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan, penekanan pada faktor kunci keber-

hasilan dimaksudkan agar dalam pencapaian tujuan benar-benar telah memperhatikan faktor lingkungan dan mengetahui secara jelas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Adapun TUJUAN STRATEGIK Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak

Indikator Tujuan:

- Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
- Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Sasaran strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Untuk mencapai Tujuan Strategi tersebut diatas, maka SASARAN STRATEGIK dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025 – 2029 dapat dirumuskan dan dijabarkan dalam 4 (empat) Sasaran Strategik sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesetaraan gender Indikator sasaran: Persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Indikator Sasaran: Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
2. Terwujudnya kesetaraan gender Indikator sasaran: Persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Indikator Sasaran: Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

3. Terpenuhiya Hak-hak Anak Serta Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Indikator sasaran: Predikat Kota Layak Anak (KLA)
4. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Indikator Sasaran: Persentase Pelaksanaan Kampung Bahagia

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program merupakan penjabaran dari tujuan secara teratur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh suatu Instansi / organisasi Pemerintah.

Tabel 3.2.1

Tujuan Dinas Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	87%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,01
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71

Tabel 3.2.2

Sasaran Dinas Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Jambi

NO	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026
1	2	3	4
	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Nindya
		Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Utama
		Persentase Pelaksanaan Kampung Bahagia	80%
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,350

Tabel 3.2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Jambi

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2026
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,01
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71
3	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	87
4	Nilai SAKIP	72
5	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,350
6	Predikat Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (APE)	Nindya
7	Persentase Pelaksanaan Kampung Bahagia	80%
8	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Utama

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

T-C 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kota Jambi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
2					Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
208					Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							

2	0	0			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kabupaten	Predikat Akuntabili- tas Kinerja Perangkat Daerah	DPMP PA	B	8.510.959.09 8	APB D	B	9.545.718.75 9
2	0	0	02.		Perencanaan, Pengang- garan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	DPMPP A	72	26.583.168	APBD	72,5	29.774.494
2	0	0	02.	0	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPP A	5 Doku- men	12.987.864	APBD	5 Doku- men	14.547.081
2	0	0	02.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Ca- paian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordi- nasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPP A	5 Laporan	13.595.304	APBD	5 Laporan	15.227.413
2	0	0	02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	DPMP PA	95%	6.450.792.621	APBD	95%	7.238.320.866
2	0	0	02.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjan- gan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPP A	93 Orang/ Bulan	6.118.840.404	APBD	93 Orang/ Bulan	6.866.532.363
2	0	0	02.	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPP A	37 Doku- men	331.952.217	APBD	37 Doku- men	371.788.503
2	0	0	02.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesion- alitas ASN PD	DPMPP A	100%	134.355.250	APBD	100%	139.279.226

2	0	0	02.	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DPMPP A	94 Paket	124.355.250	APBD		94 Paket	128.279.226
2	0	0	02.	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPP A	2 Orang	10.000.000	APBD		3 Orang	11.000.000
2	0	0	02.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU	DPMP PA	100%	452.635.672	APBD		100%	506.955.317
2	0	0	02.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMPP A	4 Paket	16.649.562	APBD		5 Paket	18.648.182
2	0	0	02.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPP A	5 Paket	265.293.242	APBD		6 Paket	297.129.104
2	0	0	02.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DPMPP A	4 Paket	20.586.818	APBD		4 Paket	23.057.909
2	0	0	02.	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPP A	18 Laporan	34.030.800	APBD		20 Laporan	38.115.169
2	0	0	02.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPP A	35 Laporan	116.075.250	APBD		40 Laporan	130.004.953

2	0	0	02.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	DPMPP A	100%	582.440.561	APBD		100%	663.534.773
2	0	0	02.	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	DPMPP A	8 Unit	239.327.758	APBD		8 Unit	268.047.761
2	0	0	02.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DPMPP A	10 Unit	343.112.803	APBD		10 Unit	395.487.012
2	0	0	02.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPP A	100%	223.399.368	APBD		100%	250.208.638
2	0	0	02.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMPP A	36 Laporan	223.399.368	APBD		36 Laporan	250.208.638
2	0	0	02.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan BMD Dalam Kondisi Baik (Layak Pakai)	DPMPP A	100%	640.752.488	APBD		100%	717.645.445
2	0	0	02.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DPMPP A	16 Unit	263.649.483	APBD		16 Unit	295.288.094

2	0	0	02.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapnagan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMPP A	5 Unit	120.483.315	APBD		5 Unit	134.941.986
2	0	0	02.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPMPP A	25 Unit	100.012.257	APBD		25 Unit	112.014.401
2	0	0	02.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPP A	2 Unit	156.607.403	APBD		2 Unit	175.400.964
2	0	0			Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender	DPMP PA	10,11	448.648.355	APB D		10,12	500.242.916
	8	2				Tingkat Partisipasi angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		64,85				66,40	
2	0	0	02.		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Standar Pelembagaan PUG Kewenangan Kota	DPMPP A	92%	134.633.509	APBD		94%	150.116.362
2	0	0	02.	0	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan	DPMPP A	39 Lembaga	134.633.509	APBD		39 Lembaga	150.116.362
2	0	0	02.		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Soisal, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Standar Pemberdayaan Perempuan bidang Politik Hukum sosial dan ekonomi	DPMPP A	20%	314.014.846	APBD		40%	350.126.554

2	08	02	02.	02	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	DPMPP A	200 Orang	314.014.846	APBD		200 Orang	350.126.554
2	08	03			Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	DPMP PA	100 Persen	319.313.010	APB D		100%	356.034.006
2	08	03	2.0	1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan standar pencegahan KTP	DPMPP A	20%	67.272.620	DAK		30%	75.008.971
2	08	03	2.0	06	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	DPMPP A	20 Lembaga	67.272.620	DAK		30 Lembaga	75.008.971
2	08	03	02.	02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Mendapatkan Layanan	DPMPP A	100%	252.040.390	APBD		100%	281.025.035

2	0	0	02.	0	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	DPMPP A	50 Orang	252.040.390	APBD		51 Orang	281.025.035
2	0	0	4		Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Pupsaga) yang Berperspektif Gender dan anak sesuai standar	DPMP PA	25	97.731.976	APB D		30	108.971.153
2	0	0	02.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kelembagaan yang berkualitas	DPMPP A	37,5%	97.731.976	APBD		37,5%	108.971.153
2	0	0	02.	0	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	DPMPP A	15 Lembaga	97.731.976	APBD		15 Lembaga	108.971.153
2	0	0	5		Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan data Gender dan Anak dalam perencanaan dan evaluasi dan / atau penyusunan kebijakan	DPMP PA	12%	146.730.392	APB D		14%	163.604.387
2	0	0	02.		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam	Persentase pemenuhan komponen SIGA	DPMPP A	50%	146.730.392	APBD		55%	163.604.387

					Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2	08	05	02.01	03	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	DPMPP A	5 Dokumen	146.730.392	APBD		5 Dokumen	163.604.387
2	08	06			Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	DPMP PA	80	193.507.593	APB D		80	215.760.967
2	08	06	02.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelembagaan PHA	DPMPP A	81%	193.507.593	APBD		101 Lembaga	215.760.967
2	08	06	02.01	03	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPP A	101 Lembaga	193.507.593	APBD		101 Lembaga	215.760.967
2	08	07			Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan	DPMP PA	100%	459.332.020	APB D		100%	512.155.203

						Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif							
						Indeks Perlindungan Khusus Anak	DPMP PA	75			76		
2	08	07	02.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan standar pencegahan KTA	DPMPP A	100%	284.200.811	APBD		100%	316.883.904
2	08	07	02.01	07	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	DPMPP A	5 Kegiatan	284.200.811	APBD		5 Kegiatan	316.883.904
2	08	07	02.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di tangani	DPMPP A	100%	175.131.209	APBD		100%	195.271.299
2	08	07	02.02	13	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	DPMPP A	50 Orang	175.131.209	APBD		51 Orang	195.271.299
2	13				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		DPMP PA		4.042.967.556	APBD			4.285.545.609

2	1	0			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	DPMPA	87%	4.042.967.556	APBD		87,5%	4.285.545.609
2	1	0	2.0		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kriteria Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang berkualitas	DPMPPA	87%	4.042.967.556	APBD		87,5%	4.285.545.609
2	1	0	02.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	DPMPPA	4 Lembaga	3.442.967.556	APBD		5 Lembaga	3.617.855.678
2	1	0	02.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DPMPPA	3 Dokumen	600.000.000	APBD		3 Dokumen	667.689.931

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun rencana kerja tahun 2026 dan menguraikan dalam 8 (delapan) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp 12.757.423.000** (dua belas Miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kota Jambi, Program Non urusan merupakan kegiatan rutin terdiri dari 1(satu) program dan 18 Sub Kegiatan, 7 (Tujuh) program urusan , 11 (sebelas) kegiatan dan 15 (lima belas) Sub. Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Urusan Wajib :

II. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a) Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b) Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, atau Hukum, atau Sosial, dan atau Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a) Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a) peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota
- 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a) Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 6. Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
- 5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - b) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Adapun uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang menggambarkan jumlah program dan jumlah kegiatan, penyebaran lokasi program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi serta alokasi kebutuhan dana/pagu indikatif, dapat dikemukakan sebagaimana tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NO	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3
1	Terwujudnya Kesenjangan Gender	1. PROGRAM PENGARUSUTMAAN GENDER DAN PEMBERERDAYAAN PEREMPUAN a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - Pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di bidang Politik, atau Hukum, atau Sosial, dan atau Ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota 2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

		- Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 3, PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK a) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan data di tingkat Kabupaten/Kota. - Penyediaan penyajian, dan pemanfaatan data gender dan anak Kabupaten/kota
2	Terpenuhinya Hak-hak Anak Serta Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	4. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 5. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan

		pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
3	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunyah Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan

		Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
--	--	--

BAB V

PENUTUP

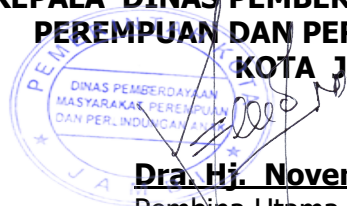
Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi diharapkan dapat diinformasikan dan dikomunikasikan ke seluruh aparat dalam Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Rencana Kerja ini memungkinkan seluruh anggota organisasi dapat memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas dan dijabarkan dalam program dan kegiatan selama Tahun 2026. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, ini merupakan rangkaian rencana program kegiatan untuk Tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sebagai penjabaran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

Untuk ini diharapkan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yang direncanakan akan terlaksana dan terkoordinasi dengan baik serta dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan strategis dalam kurun waktu tersebut akan senantiasa mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan rencana ini, semoga dapat bermanfaat dan dalam menjalankan tugas kedepannya mempunyai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas yang diemban dalam kegiatan pembangunan Daerah Kota Jambi.

Jambi, 27 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA JAMBI,**



Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19711125 199201 2 001